

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



PROGRAM STUDI SARJANA (S1) ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM



UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dapat terlaksana dengan baik. Rapat ini merupakan langkah penting dalam mengkoordinasikan tindak lanjut dan realisasi dari Temuan Audit Mutu Internal pada seluruh program studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2024.

Rapat Tinjauan Manajemen ini menjadi wadah bagi seluruh pihak terkait untuk menyepakati langkah-langkah pengendalian, perbaikan, serta peningkatan yang sejalan dengan siklus penjaminan mutu internal. Siklus ini memegang peranan krusial dalam pengelolaan program studi maupun unit penyelenggara program studi, dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Udayana. Melalui upaya ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan akademik dan layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum Universitas Udayana telah merangkum hasil-hasil penting dari RTM dalam laporan ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pengelolaan mutu di tingkat fakultas dan program studi, sehingga setiap unit dapat berkontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan penjaminan mutu yang holistik.

RTM dihadiri oleh berbagai elemen pengelola di Fakultas Hukum, termasuk Dekanat, Koordinator Program Studi, Tim Pelaksana Penjaminan Mutu, serta Koordinator dan Subkoordinator Tenaga Kependidikan. Kehadiran semua pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan penjaminan mutu secara menyeluruh dan terpadu. Diskusi yang konstruktif selama rapat ini telah menghasilkan berbagai rekomendasi yang relevan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah berkontribusi aktif dalam RTM ini. Semoga laporan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat terus melangkah menuju pencapaian visi dan misi fakultas yang lebih baik.

Denpasar, 10 Desember 2024
Hormat kami,

Koordinator

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I.PELAKSANAAN RTM	1
1.1. RTM Prodi Sarjana Ilmu Hukum.....	2
1.2. RTM Prodi Magister Ilmu Hukum.....	3
1.3. RTM Prodi Magister Kenotariatan.....	5
1.4 RTM Prodi Doktor Ilmu Hukum.....	7

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN :

Rapat dilaksanakan pada : Selasa, 10 Desember 2024 bertempat di Ruang *Video Conference* FH Unud. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Audit Mutu Internal pada 4 Program Studi pada unit penyelenggara program studi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pembahasan seluruh hasil temuan ketidaksesuaian dan observasi dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen/pengelola.

Pembahasan seluruh hasil temuan ketidaksesuaian dan observasi yaitu pada seluruh Program Studi:

1. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum
2. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
3. Program Studi Magister (S2) Kenotariatan
4. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum

1. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum (SIH)

Kegiatan RTM merekam respon dan tindak lanjut hasil temuan audit dan menjadi pedoman untuk terpeliharanya kinerja proses, kesesuaian hasil perbaikan, status tindakan pencegahan dan perbaikan sehingga tetap memberi jaminan terpeliharanya budaya mutu pada prodi SIH Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dalam rapat tinjauan manajemen pimpinan FH dan koordinator prodi studi SIH dan TPPM serta staff tendik memastikan temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini mencakup penyempurnaan dan ketersediaan dokumen yang menjadi temuan, yakni:

1. Dalam dokumen visi, misi, tujuan dan strategi, belum terdapat dokumen spesifikasi prodi;
2. Dalam kriteria mahasiswa, proses bimbingan dan konseling belum terdokumentasi;
3. Dalam kriteria pengabdian, perlu adanya peningkatan rata-rata PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir; dan
4. Dalam kriteria luaran, dibutuhkan pengukuran CPL.

Berikut adalah rencana tindak lanjut untuk merespons temuan audit mutu internal tersebut:

1. Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Dalam merespon belum tersedianya dokumen spesifikasi prodi, Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum dan tim TPPM akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan spesifik Prodi S1 Ilmu Hukum berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi prodi.
- Menyusun dokumen spesifikasi program studi yang mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran, dan kurikulum.
- Mengadakan workshop internal untuk validasi dokumen spesifikasi prodi.
- Mengintegrasikan dokumen spesifikasi prodi ke dalam dokumen akademik utama.

2. Kriteria Mahasiswa: Proses Bimbingan dan Konseling

- Dalam merespon proses bimbingan dan konseling yang belum terdokumentasi, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:
 - Membuat format standar untuk dokumentasi proses bimbingan dan konseling.
 - Menyusun SOP bimbingan dan konseling mahasiswa.
 - Memberikan pelatihan kepada dosen pembimbing terkait pentingnya dokumentasi.
 - Menyediakan sistem digital dalam proses administrasi bimbingan.

3. Kriteria Pengabdian: Peningkatan Rata-Rata PkM DTPS

Dalam meningkatkan rata-rata PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- Memberikan penghargaan bagi dosen yang aktif melaksanakan PkM.
- Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas proposal PkM.
- Membuat kolaborasi PkM dengan mitra eksternal seperti pemerintah daerah atau industri.

4. Kriteria Luaran: Pengukuran CPL

- Dalam melakukan pengukuran capaian pembelajaran lulusan (CPL), beberapa hal yang dilakukan antara lain:
 - Menyusun rubrik pengukuran CPL berdasarkan standar kompetensi lulusan.
 - Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait implementasi pengukuran CPL.
 - Mengintegrasikan pengukuran CPL dalam proses penilaian tugas akhir, skripsi, atau proyek akhir.
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengukuran CPL untuk perbaikan kurikulum.

2. Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH)

Pelaksanaan audit mutu internal telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 dan realisasi tindak lanjut hasil temuan audit baik di tingkat prodi dan UPPS dilaksanakan melalui Rapat Tinjauan Manajemen sehingga terjawab perbaikan yang mewujudkan performa budaya mutu pada prodi Magister (S2) Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pembahasan seluruh hasil temuan ketidaksesuaian dan observasi dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen/pengelola Prodi dan UPPS FH pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 10 Desember 2024.

Dalam RTM, pimpinan FH dan koordinator prodi studi Magister Ilmu Hukum dan TPPM serta staff tendik mengevaluasi temuan dengan perbaikan dan ketersediaan dokumen sesuai Permintaan Tindak Koreksi (PTK). Adapun beberapa temuan adalah sebagai berikut:

1. Dalam dokumen visi, misi, tujuan dan strategi, belum terdapat dokumen spesifikasi prodi MIH;
2. Dalam kriteria tata pamong, tata kelola, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu, belum tersedia dokumen struktur organisasi kepemimpinan yang eksplisit tentang hubungan garis kerja antara UPPS dan Prodi serta dokumen struktur organisasi internal dalam prodi MIH yang menunjukkan garis penyelenggaraan organisasi kerja di Prodi MIH.

Berikut adalah rencana tindak lanjut untuk merespons temuan audit mutu internal tersebut:

1. Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Dalam merespon belum tersedianya dokumen spesifikasi prodi, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan tim TPPM akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan spesifik Prodi MIH berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi prodi.
- Menyusun dokumen spesifikasi prodi MIH yang mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran, dan kurikulum.
- Mengadakan workshop internal untuk validasi dokumen spesifikasi prodi.
- Mengintegrasikan dokumen spesifikasi prodi ke dalam dokumen akademik utama.

2. Dokumen Struktur Organisasi Kepemimpinan (Hubungan UPPS dan Prodi)

Terkait struktur organisasi kepemimpinan, adapun tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi antara UPPS dan Prodi MIH untuk mengidentifikasi fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing unit.
- Menyusun dokumen struktur organisasi kepemimpinan yang menjelaskan hubungan garis kerja antara UPPS dan Prodi secara eksplisit.
- Melakukan validasi dokumen dengan melibatkan pimpinan fakultas dan UPPS.
- Mensosialisasikan dokumen kepada seluruh pihak terkait.

2. Dokumen Struktur Organisasi Internal Prodi MIH

Terkait struktur organisasi internal prodi MIH, beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi struktur dan kebutuhan organisasi internal Prodi MIH, termasuk fungsi-fungsi utama seperti akademik, administrasi, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu.
- Menyusun dokumen struktur organisasi internal Prodi MIH yang mencakup garis penyelenggaraan organisasi kerja, alur koordinasi, dan tanggung jawab setiap posisi.
- Melakukan validasi internal melalui rapat Prodi MIH.
- Mengintegrasikan struktur organisasi tersebut ke dalam dokumen tata pamong Prodi.
- Mensosialisasikan dokumen kepada seluruh staf dan dosen di Prodi MIH.

3. Program Studi Magister Kenotariatan

Tindak lanjut dari temuan Audit Mutu Internal pada prodi Magister (S2) Kenotariatan yang dilaksanakan pada 10 Desember 2024 yaitu melalui Rapat Tinjauan Manajemen dengan pembahasan seluruh hasil temuan ketidaksesuaian dan observasi dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen/pengelola Prodi dan UPPS. Hal-hal yang menjadi perhatian dan respon untuk melakukan realisasi dan tindak lanjut hasil temuan audit baik di tingkat prodi dan UPPS sehingga terjawab dengan performa perbaikan yang mewujudkan budaya mutu pada prodi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dalam RTM, pimpinan FH dan koordinator prodi studi Magister Kenotariatan dan TPPM serta staff tendik mengevaluasi temuan dengan perbaikan dan ketersediaan dokumen sesuai Permintaan Tindak Koreksi (PTK). Adapun beberapa temuan adalah sebagai berikut:

1. Dalam dokumen visi, misi, tujuan dan strategi, belum terdapat dokumen spesifikasi prodi MKn;
2. Dalam kriteria tata pamong, tata kelola, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu, belum tersedia dokumen struktur organisasi kepemimpinan yang eksplisit tentang hubungan garis kerja antara UPPS dan Prodi serta dokumen struktur organisasi internal dalm prodi MKn yang menunjukkan garis penyelenggaraan organisasi kerja di Prodi MKn.

Berikut adalah rencana tindak lanjut untuk merespons temuan audit mutu internal tersebut:

1. Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Dalam merespon belum tersedianya dokumen spesifikasi prodi, Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan tim TPPM akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan spesifik Prodi MKn berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi prodi.
- Menyusun dokumen spesifikasi prodi MKn yang mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran, dan kurikulum.
- Mengadakan workshop internal untuk validasi dokumen spesifikasi prodi.
- Mengintegrasikan dokumen spesifikasi prodi ke dalam dokumen akademik utama.

2. Dokumen Struktur Organisasi Kepemimpinan (Hubungan UPPS dan Prodi)

Terkait struktur organisasi kepemimpinan, adapun tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi antara UPPS dan Prodi MKn untuk mengidentifikasi fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing unit.
- Menyusun dokumen struktur organisasi kepemimpinan yang menjelaskan hubungan garis kerja antara UPPS dan Prodi secara eksplisit.
- Melakukan validasi dokumen dengan melibatkan pimpinan fakultas dan UPPS.
- Mensosialisasikan dokumen kepada seluruh pihak terkait.

3. Dokumen Struktur Organisasi Internal Prodi MKn

Terkait struktur organisasi internal prodi MKn, beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi struktur dan kebutuhan organisasi internal Prodi MKn, termasuk fungsi-fungsi utama seperti akademik, administrasi, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu.
- Menyusun dokumen struktur organisasi internal Prodi MKn yang mencakup garis penyelenggaraan organisasi kerja, alur koordinasi, dan tanggung jawab setiap posisi.
- Melakukan validasi internal melalui rapat Prodi MKn.
- Mengintegrasikan struktur organisasi tersebut ke dalam dokumen tata pamong Prodi.
- Mensosialisasikan dokumen kepada seluruh staf dan dosen di Prodi MKn.

4. Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Rapat Tinjauan Manajemen merespon dan melakukan realisasi tindak lanjut hasil temuan audit baik di tingkat prodi dan UPPS sehingga terjawab dengan performa perbaikan yang mewujudkan budaya mutu pada prodi Doktor (S3) Ilmu Hukum (DIH) Fakultas Hukum Universitas Udayana. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Audit Mutu Internal pada prodi DIH 10 Desember 2024 dengan pembahasan seluruh hasil temuan ketidaksesuaian dan observasi dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen/pengelola.

Dalam RTM, pimpinan FH dan koordinator prodi studi DIH dan TPPM serta staff tendik mengevaluasi temuan dengan perbaikan dan ketersediaan dokumen sesuai Permintaan Tindak Koreksi (PTK). Adapun beberapa temuan adalah sebagai berikut:

1. Turunan visi misi belum dirumuskan dalam nuku pedomik PSDIH;
2. Dalam monitoring dan evaluasi tata kelola serta capaian, belum terdapat dokumen dan bukti pelaksanaannya;
3. Dibutuhkan kelengkapan kurikulum dalam kriteria pendidikan; dan

4. Dalam kriteria pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan alokasi pendanaan yang lebih maksimal untuk menunjang kegiatan ini.

Berikut adalah rencana tindak lanjut untuk merespons temuan audit mutu internal tersebut:

1. Turunan Visi dan Misi Belum Dirumuskan dalam Buku Pedoman PSDIH

Terkait perumusan visi misi yang perlu dirumuskan kedalam buku pedoman PSDIH, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- Mengadakan rapat kerja untuk merumuskan turunan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran yang spesifik untuk PSDIH.
- Menyusun narasi yang jelas mengenai turunan visi dan misi kedalam buku pedoman.
- Melakukan validasi dokumen dengan pimpinan program studi dan fakultas.
- Mengintegrasikan turunan visi dan misi ke dalam buku pedoman PSDIH.

2. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola serta Capaian Belum Terdokumentasi

Berkaitan dengan proses pendokumentasian proses monitoring dan evaluasi tata kelola serta capaian, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- Menyusun mekanisme dan format standar untuk monitoring dan evaluasi tata kelola serta capaian PSDIH.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pihak terkait.
- Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan tertulis.
- Membuat sistem digital dalam pengarsipan dokumen monitoring dan evaluasi.

3. Kelengkapan Kurikulum dalam Kriteria Pendidikan

Dalam melengkapi kurikulum di kriteria pendidikan, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- Mengadakan rapat dengan dosen pengampu untuk menyusun kelengkapan kurikulum, termasuk matriks capaian pembelajaran, silabus, dan bahan ajar.
- Menyelaraskan kurikulum dengan visi, misi, dan kebutuhan pasar kerja.
- Melakukan validasi kurikulum yang telah disempurnakan oleh tim akademik fakultas.
- Mendistribusikan kurikulum yang telah diperbarui kepada dosen dan mahasiswa.

4. Alokasi Pendanaan untuk Pengabdian kepada Masyarakat

Berkaitan dengan alokasi pendanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, beberapa langkah tindak lanjut, adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran ke pimpinan fakultas dan universitas.
- Mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung kegiatan pengabdian, seperti pelatihan, seminar, dan bantuan hukum.
- Memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan alokasi pendanaan.
- Mendokumentasikan penggunaan dana dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.